ANALISIS BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Dila Apriani
NIM : 22 2012 139

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

ANALISIS BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Nama : Dila Apriani
NIM : 22 2012 139

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dila Apriani

Nim : 22 2012 139

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Agustus 2016

METERAI TEMPEL
AC33AAEF087119924
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dila Apriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Analisis Belanja Langsung Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang**
Nama	**: Dila Apriani**
NIM	**: 222012139**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....

Pembimbing,

(Muhammad Fahmi, S.E., M.Si)
NIDN: 0029097804

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

(Betri Surajudin, S.E., Ak., M.Si)
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO :

- ***Jadilah kalah karena mengalah, bukan kalah karena menyerah. Jadilah pemenang karena kemampuan, bukan menang karena kecurangan.***
- ***Pengalaman merupakan pelajaran terbaik dalam meniti kehidupan.***
- ***Semakin parah kau jatuh, maka akan semakin kuat kau untuk bangkit.***

Kupersembahkan Untuk :

- ***Kedua Orang Tuaku Tersayang***
- ***Saudara-saudaraku Tercinta***
- ***Sahabatku***
- ***Dosen Pembimbing***
- ***Seluruh Dosen Pengajar***
- ***Almamaterku***

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat-Nya lah penulisan skripsi dengan judul "Analisis Belanja Langsung Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang", dapat penulis selesaikan sebagimana waktu yang telah dijadwalkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing serta memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada kedua orang tua saya Mama dan Papa yang sangat berjasa bagi hidup saya. Tanpa mereka saya tidaklah berarti apa-apa, doa dan dukungan spiritual juga mereka berikan, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kasih sayang, ketabahan, kesabaran serta doa yang kalian berikan.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Abid Djazuli, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Fauzi Ridwan, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Muhammad Fahmi, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis, serta waktu yang telah diluangkan setiap penulis butuhkan.

4. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si, Ak, CA dan Bapak Mizan, SE., Ak, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa, Mama, Kak Dika, Yuk Vina, dan Kak Bagus yang telah banyak memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Untuk orang yang tersayang Piyto Aguli Utama yang selalu ada menemani selama ini sampai selesainya skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku tercinta (Retno Sari, Diska Trisendi, dan Afifah Kamilah) yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan selama empat tahun ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
8. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang telah mengizinkan untuk pengambilan data selama penulis menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya semoga Allah SWT dapat memberikan balasan dan karunia-Nya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Palembang, Agustus 2016

Dila Apriani

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI viii

HALAMAN DAFTAR TABEL x

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xi

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 7

B. Landasan Teori 10

1. Keuangan Daerah 10

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 13

3. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 26

4. Kebijakan atas Belanja Pemerintah Daerah..... 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian..... 38

B. Lokasi Penelitian..... 38

C. Operasionalisasi Variabel 39

D. Data yang diperlukan..... 39

E. Metode Pengumpulan Data..... 40

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 41

BAB IV HASIL PENEILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 42

B. Pembahasan Hasil Penelitian..... 48

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan..... 65

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 4

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya 9

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 39

Tabel IV.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 48

Tabel IV.2 Kriteria Kinerja Anggaran 50

Tabel IV.3 Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja Langsung 53

Tabel IV.4 Kriteria Kinerja Anggaran 55

Tabel IV.5 Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Langsung 58

Tabel IV.6 Program dan Kegiatan 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset 1

Lampiran 2 Data Realisasi Anggaran Tahun 2012 2

Lampiran 3 Data Realisasi Anggaran Tahun 2013 3

Lampiran 4 Data Realisasi Anggaran Tahun 2014 4

Lampiran 5 Data Realisasi Anggaran Tahun 2015 5

Lampiran 6 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi 6

Lampiran 7 Biodata Penulis 7

Lampiran 8 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi 8

ABSTRAK

Dila Apriani/222012139/Analisis Belanja Langsung Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana belanja langsung berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palembang tahun 2012-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis belanja langsung berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palembang tahun 2012-2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dengan secara langsung melalui studi lapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah untuk belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dikelola berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Anggaran belanja, belanja langsung

ABSTRACT

Dila Apriani/222012139/Analysis of Direct Expenditure Based on The General Principles of Financial Management at the Department Communication and Informatics of Palembang

Formulation of problem in this research was how direct expenditure by general principles of financial management at the Department Communication and Informatics of Palembang in 2012-2015. This research aimed for finding utilization of direct expenditure of the education sector budget of Palembang. This research was conducted by using descriptive. The data were collected by using interview and documentation. The data were analyzed by using qualitative analysis, it analyzed the data in sentences. The result showed financial management for direct expenditure at the Department Communication and Informatics of Palembang has been managed under the principles of financial management.

Key words: budget allocation, direct expenditure

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan maupun instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang usaha apapun, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari perencanaan. Perencanaan yang baik sangat penting bagi perusahaan terutama instansi pemerintah yang seluruh kegiatannya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Perencanaan merupakan suatu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan garis-garis besar untuk dapat melakukan usaha, dimana kebijaksanaan ditetapkan, rencana kerja disusun, baik mengenai saat dilaksanakan dan bagaimana usaha itu akan dikerjakan.

Semua keputusan perencanaan sekurang-kurangnya memperhatikan dua macam pedoman yaitu pedoman kualitatif dan kuantitatif. Pedoman kualitatif pada perencanan dapat berupa pengembangan manajemen, citra perusahaan atau instansi pemerintah, sumbangan pada masyarakat, pengembangan bakat dan kemajuan teknik, sedangkan pedoman kuantitatif adalah pedoman yang mengajukan pertanyaan "seberapa banyak", inilah nama yang sering sekali disebut, yaitu anggaran.

Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam situasi seperti itu menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran yang pada dasarnya merupakan dana publik (*public money*) habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini cenderung memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator, dan *enterpreneur* dalam proses pembangunan.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Instansi pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya adalah anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Sedangkan anggaran belanja adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun.

Suatu perusahaan maupun instansi pemerintah dalam menyusun anggaran perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi syarat perusahaan dalam menyusun anggaran yaitu adanya organisasi perusahaan yang sehat yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian analisis yang diperlukan untuk menetapkan alat ukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi, adanya dukungan dari para pelaksana, anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun tingkat bawah.

Selain memiliki berbagai anggaran instansi pemerintah juga memiliki berbagai jenis belanja diantaranya adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa azas umum

pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut ini adalah anggaran dan realisasi belanja dan belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2012-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2012	4.939.588.740	4.587.265.462	92,86
2013	5.796.937.000	5.163.138.634	89,06
2014	4.750.327.000	4.416.030.348	92,96
2015	8.507.061.600	8.134.085.301	95,61

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, 2016

Berdasarkan tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang pada 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan ditiap tahunnya. Pada tahun 2012 realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan anggaran yang diberikan pemerintah yaitu 92,86%, ditahun 2013 realisasi anggaran menurun dari tahun sebelumnya sebesar 89,06%, selanjutnya pada tahun 2014 realisasi anggaran meningkat lagi sebesar 92,96%, dan di tahun terakhir 2015 realisasi anggaran menjadi 95,61%.

Tidak terealisasinya anggaran 100% menyebabkan anggaran belanja langsung tidak efektif. Ketidakefektifan ini menyebabkan banyak

layanan publik tidak dijalankan sepenuhnya dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan permasalahan diatas tidak terealisasinya 100% anggaran menunjukkan anggaran belanja langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tidak memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah sehingga alokasi anggaran belanja langsung harus diperbaiki. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Belanja Langsung Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah belanja langsung berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2012-2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis belanja langsung berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2012-2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.

2. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki dalam menyempurnakan pelaporan keuangan pemerintah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Mongkau (2011). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas dan efisiensi anggaran belanja daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektfitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini adalah membandingkan tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 lebih domain efektif dan efisien, bahwa pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara telah memaksimalkan kenaikan maupun penurunan realisasi anggaran belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Penelitian yang kedua berjudul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung Pada SKPD Kota Bitung yang dilakukan oleh Anastasia Patrisia (2013). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja

langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerrintahan. Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran khususnya tahun anggaran 2011 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang ketiga berjudul Analisis Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh Retno Sundari (2013). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap capaian kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap capaian kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini adalah tidak berpengaruh signifikan antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mongkau (2011)	Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Menganalisis Anggaran Belanja	Penelitian sebelumnya menganalisis belanja langsung berdasarkan tingkat varians (selisih), tingkat pertumbuhan dan efisiensi, sedangkan penulis menganalisis belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
2	Anastasia Patrisia (2013)	Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung Pada SKPD Kota Bitung	Menganalisis Anggaran Belanja	Penelitian sebelumnya menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung, sedangkan penulis hanya menganalisis belanja langsung
3	Retno Sundari (2013)	Analisis Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	Menganalisis Anggaran Belanja	Penelitian sebelumnya menganalisis adakah pengaruh belanja langsung terhadap capaian kinerja, sedangkan penulis hanya menganalisis belanja langsung

Sumber: Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Abdul (2012: 24) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat (6) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat (8), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3) Efektif sebagaimana dimaksud di atas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4) Efisien sebagaimana dimaksud di atas merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau

penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5) Transparan sebagaimana dimaksud di atas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

6) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

7) Keadilan sebagaimana dimaksud di atas adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

8) Kepatutan sebagaimana dimaksud di atas adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

9) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

c. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

PP No. 105 tahun 2006 pasal 1 ayat (4) tentang pertanggungjawaban keuangan daerah menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas:

1) Laporan penghitungan APBD
2) Nota penghitungan APBD
3) Laporan Aliran Kas
4) Neraca Daerah

2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

a. **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Abdul (2012: 24) APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan.
3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4) Periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Dari beberapa pengertian tersebut jelas bahwa APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas, dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

b. Azaz Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa azaz umum yaitu:

1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan

pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

c. **Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi Otorisasi

Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2) Fungsi Perencanaan

Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4) Fungsi Alokasi

Mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.

d. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Abdul (2012: 5), dilihat dari siklusnya APBD dibagi menjadi:

1) Penyusunan APBD

Bermula dari proses rencana APBD dilanjutkan pembahasan bersama DPRD dan melibatkan semua bagian dalam SKPD. APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2) Perubahan APBD

Prosesnya sama dengan proses penyusunan APBD. Perubahan APBD pada prinsipnya adalah melakukan penambahan, pengurangan, atau pergeseran anggaran.

3) Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD diawali dengan pengisian Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) atau Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan harian. Secara berkala disusun laporan triwulanan. Laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Pengawasan pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh DPRD. Laporan pertanggungjawaban yang diterbitkan pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4) Penghitungan APBD

Penghitungan APBD dilakukan setelah APBD dilaksanakan dan diproses seperti penyusunan APBD.

e. Norma dan Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Permendagri No. 27 Tahun 2013 pasal 2 perihal pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 disebutkan dalam penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Transparansi Anggaran Daerah

Merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberi informasi yang jelas tentang tujuan, sarana, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu, setiap dana yang diperoleh pengunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2) Disiplin Anggaran APBD

Disiplin anggaran APBD disusun dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran harus disusun berlandaskan azas efesiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran Pembiayaan Pemerintah Daerah

Keadilan anggaran pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

4) Efesiensi dan Efektivitas Anggaran

Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

5) Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Struktur APBD

Permendagri No. 57 Tahun 2009 pasal 20 ayat (2) tentang pengelolaan keuangan daerah APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Permendagri No. 57 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud di atas meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Umum Kas Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

a) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPD.

b) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

3) Pembiayaan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menerapkan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Adapun Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

a) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

   Sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

b) Pencairan Dana Cadangan

   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan

aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

f) Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

b) Investasi Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka pendek mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12

(duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Sedangkan investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dengan tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

c) Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d) Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

3. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

a. Belanja Tidak Langsung

Erlina, dkk (2015: 155) Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menjadi 8 macam menurut jenis belanja, yaitu:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Bunga

Bunga digunakan untuk menggambarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Subsidi

Subsidi menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Hibah

Hibah menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota atau pendapatan kabupaten dan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau pemerintah dari kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai sebagaimana mestinya untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai pemanfaatannya kurang dari 12 bulan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Belanja modal sebagaimana mestinya digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian dan pengadaan barang dan nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

4. Kebijakan atas Belanja Pemerintah Daerah Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 merupakan aturan pengelolaan keuangan daerah yang bersifat (*single entry*) menjadi (*double entry*) atau yang lazim disebut akuntansi.

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan ke dalam lima kelompok, yaitu:

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas/pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Belanja pegawai meliputi:

(a) Belanja Gaji dan Tunjangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan gaji pegawai serta

dewan. Contohnya, Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan.

(b) Biaya Perawatan dan Pengobatan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran kesehatan pegawai dan dewan yang ditanggung pemerintah daerah. Contohnya, Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal, Biaya Pengobatan Lanjut Dalam Daerah, dan Biaya Pengobatan Lanjut Luar Daerah.

(c) Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Contohnya, Biaya Beasiswa Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas, Biaya Kursus Keterampilan dan *Job Training*, dan Biaya Riset dan Studi (Penulisan Karya Ilmiah).

2) Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja barang terdiri atas:

(a) Belanja Bahan Habis Pakai. Contohnya, Biaya Alat Listrik dan Elektronik, Biaya Alat Tulis dan Biaya Gas.

(b) Biaya Jasa Kantor, yaitu biaya yang berhubungan dengan pelayanan serta penunjang administrasi kantor. Contohnya, Biaya Kawat dan Faks, dan Biaya Pengiriman.

(c) Biaya Cetak dan Pengadaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencetak dan pengadaan. Contohnya, Biaya Cetakan dan Fotokopi.

(d) Biaya Langganan, yaitu pengeluaran yang dibayar setelah manfaatnya dinikmati selama suatu periode. Contohnya, Biaya Listrik, Biaya Telepon, dan Biaya Air.

(e) Biaya Pakaian Dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan pakaian dinas pegawai dan dewan. Contohnya, Biaya Pakaian Dinas, Biaya Pakaian Upacara, dan Biaya Pakaian Polisi/Mantri/Agen Pamong Praja.

3) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Biaya ini terdiri atas:

(a) Biaya Perjalanan Dinas, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai atau dewan yang menjalankan tugas. Contohnya, Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

(b) Biaya Perjalanan Pindah, yaitu pengeluaran perjalanan bagi pegawai yang pindah. Contohnya, Biaya Perjalanan Pindah Dalam Daerah, dan Biaya Perjalanan Pindah Luar Daerah.

(c) Biaya Pemulangan Pegawai yang Gugur, Dipensiunkan, dan Cuti Besar. Contohnya, Biaya Pemulangan Pensiun di Daerah, Biaya Pemulangan Pensiun diluar Daerah, dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Gugur.

4) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Biaya pemeliharaan ini terdiri atas:

(a) Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Gedung dan Jendela, Biaya Pemeliharaan Atap, dan Biaya Pemeliharaan Lantai.

(b) Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas dan Asrama. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Pintu dan Jendela, Biaya Pemeliharaan Atap, dan Biaya Pemeliharaan Lantai.

(c) Biaya Pemeliharaan *Meubleair*, yaitu pemeliharaan yang terkait dengan pemeliharaan *meubleair* kantor. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Meja, Biaya Pemeliharaan Kursi, dan Biaya Pemeliharaan Lemari.

(d) Biaya Perlengkapan Kantor, yaitu pemeliharaan untuk pemeliharaan barang kantor yang apabila dioperasikan memerlukan operator. Contohnya, Biaya Pemeliharaan

AC, Biaya Pemeliharaan *Sound System*, dan Biaya Pemeliharaan OHP.

(e) Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan kantor yang apabila dioperasikan tidak memerlukan operator. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Komputer, Biaya Pemeliharaan Mesin Ketik, dan Biaya Pemeliharaan Mesin Fotokopi.

(f) Biaya Pemeliharaan *Emplacement* Kantor. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Pagar, Biaya Pemeliharaan Taman, dan Biaya Pemeliharaan Halaman Parkir.

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik terdiri atas:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. Belanja pegawai ini terdiri atas:

(a) Honorarium, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran honor personal/orang yang secara langsung melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya, Honor Harian, Honor Bulanan, dan Honor Proyek.

(b) Upah Lembur, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai karena bekerja diluar jam kerja yang meliputi upah harian tetap, dan upah harian lepas.

(c) Uang Paket, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk anggota dan pimpinan dewan pada kegiatan sidang dewan.

(d) Insentif, yaitu pengeluaran guna pemberian uang perangsang atau insentif orang/personal yang bekerja untuk suatu kegiatan.

2) Belanja Barang

Belanja Barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja barang ini terdiri atas:

(a) Biaya Sewa, yaitu pengeluaran untuk sewa tempat guna pelaksanaan suatu aktivitas. Contohnya, Biaya Sewa Gedung, Biaya Sewa Pelabuhan, dan Biaya Sewa Tempat Pelelangan dan Penjualan.

(b) Biaya Bahan Percontohan, yang meliputi hewan dan tanaman.

c. **Belanja Perjalanan**

Belanja Perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Biaya ini antara lain meliputi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

d. **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik. Biaya pemeliharaan ini meliputi:

1) Biaya Pemeliharaan Gedung Pelayanan Umum. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Gedung Olahraga, Biaya Pemeliharaan Wisma, dan Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit.
2) Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Jembatan Timbang, Biaya Pemeliharaan Jalan Daerah Provinsi, dan Biaya Pemeliharaan Jembatan.

3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan. Contohnya, Biaya Pengujian Kendaraan, Biaya Reparasi dan Penggantian Suku Cadang, dan Biaya Pembelian Ban.
4) Biaya Pemeliharaan Peralatan Operasional. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Bengkel, Biaya Pemeliharaan Peralatan Pertanian, dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kesehatan.
5) Biaya Pemeliharaan Mesin. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Mesin Cetak, Biaya Pemeliharaan Mesin Pengeboran Tanah, dan Biaya Pemeliharaan Mesin Pabrik.
6) Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Operasional. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kesehatan, Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Pendidikan, dan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Pertanian.
7) Biaya Pemeliharaan Sungai dan Saluran.
8) Biaya Pemeliharaan Musem. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Museum Perjuangan, Biaya Pemeliharaan Museum Peninggalan Purbakala, dan Biaya Pemeliharaan Museum Budaya.
9) Biaya Pemeliharaan Terminal. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Terminal Bus/Truk, Biaya Pemeliharaan Terminal Peti Kemas, dan Biaya Pemeliharaan Terminal Laut.

10) Biaya Pemeliharaan Kebun dan Ternak. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Kebun, Biaya Pemeliharaan Ternak, dan Biaya Pemeliharaan Kolam.

11) Biaya Pemeliharaan Taman. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Taman Rekreasi.

12) Biaya Pemeliharaan *Emplacement*. Contohnya, Biaya Pemeliharaan *Emplacement* Rumah Sakit, dan Biaya Pemeliharaan *Emplacement* Bangunan.

e. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya, Pembangunan Jembatan dan Jalan Raya, Pembelian Alat Transportasi Massa, dan Pembelian Mobil Ambulans.

2) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati masyarakat tetapi dirasakan secara langsung aparatur. Contohnya, Pembelian Kendaraan Dinas, Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Pembangunan Rumah Dinas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2011: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi atau tingkat penjelasannya yaitu:

1) Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2) Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3) Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan memadukan data sehingga pada akhirnya ditemukan kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang beralamatkan di Jalan Nyoman Ratu No. 1271, Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.I
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Belanja Langsung Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.	a) Secara tertib b) Taat pada peraturan perundang-undangan c) Efektif d) Efisien e) Transparan f) Bertanggungjawab g) Keadilan h) Kepatuhan i) Manfaat untuk masyarakat

Sumber: Penulis, 2016

D. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1) Data Primer

   Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2) Data Sekunder

   Data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data berupa data alokasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang

diperoleh secara langsung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:402-425) bahwa dilihat dari segi atau cara teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Interview (wawancara)

   Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2) Kuesioner (angket)

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yangdilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu berkomunikasi kepada petugas bagian keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang secara langsung tentang sample yang berhubungan dengan

penelitian ini, dan dokumentasi yaitu dengan meminta data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sama dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data dan Teknis Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2009:13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam hal ini yakni mengenai Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

2. Teknis Analisis

Berdasarkan analisis data selanjutnya dilakukan dalam teknis analisisnya. Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu menganalisis data dalam bentuk kalimat dan angka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sebelumnya Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang berasal Kantor Deppen Kota Palembang yang merupakan inovasi vertikal Deppen RI setelah dilikuidasi dan berubah status menjadi Dinas Daerah berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2001 tentang pembentukan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1) Memimpin kegiatan dinas dan urusan kesekretarisan serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
2) Penyusun Visi, Misi dan Rencana Stategis Dinas.

3) Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi; Pengembangan Komunikasi dan Informatika; Informasi Publik; Diseminasi Informasi dan Perdayaan Telematika,Pos dan Telekomunikasi.
4) Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
5) Pelaksanaan Komunikasi, konsultansi dan kerja sama dengan unsur pemerintah kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
6) Evaluasi dan Pelaporan.
7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yang luas dan kompleks. Secara umum tugas pokok tersebut adalah membantu dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

a. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang, "Palembang EMAS Tahun 2018" maka ditetapkan Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun 2013-2018 sebagai berikut : "Terwujudnya

Palembang yang informatif, maju dan profesional yang berbasis teknologi dan mass media."

b. Misi

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, menetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas peran mass media dalam mewujudkan pelayanan informasi publik.
2) Peningkatan SDM dan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika yang handal.
3) Peningkatan, pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan TIK.

3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Strategi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah menyusun strategi sebagai berikut:

1) Pengembangan sistem adminitrasi daerah yang berbasis teknologi informasi.

2) Memanfaatkan dengan optimal jaringan dan media informasi yang ada di masyarakat serta melakukan kemitraan dengan lembaga – lembaga penyiaran publik, dan lembaga pers.
3) Mengoptimalkan pelayanan media center untuk penyebaran informasi dan melakukan pendataan, perizinan/rekomendasi dan pengawasan akan peran dan fungsi lembaga pos dan telekomunikasi.

Kebijakan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Guna mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1) Penguatan kecamatan dalam pelayanan public berbasis teknologi informasi.
2) Melakukan pembinaan di bidang penyiaran dan kelembagaan komunikasi.
3) Mengefektifkan media center dan pembinaan di bidang pos dan telekomunikasi.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Kepegawaian
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Informasi Publik, membawahi:
   a. Seksi Pengelolaan Informasi Politik, Hukum dan Keamanan
   b. Seksi Pengelolaan Informasi Ekonomi dan Kesejahteraan
   c. Seksi Penyerapan Opini Publik
4. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi:
   a. Seksi Desiminasi Melalui Media
   b. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial
   c. Seksi kelembagaan Komunikasi Pemerintah
5. Bidang Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
   a. Seksi Pemberdayaan Telematika
   b. Seksi Pelayanan Media Center
   c. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

6. Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informatika, membawahi:
   a. Seksi Pengembangan Komunikasi Diseminasi Informasi
   b. Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi, Komunikasi dan Informasi
   c. Seksi Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas
Komunikasi dan InformatikaKota Palembang

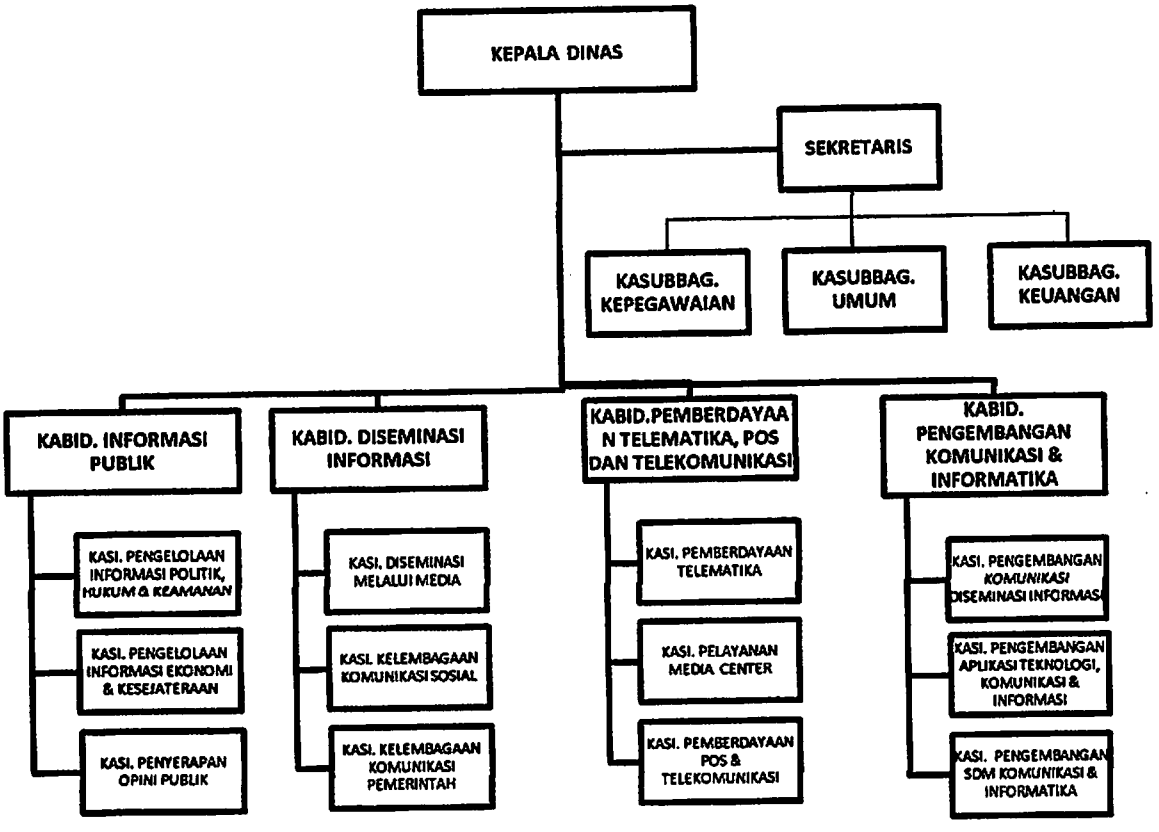

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, 2016

B. Pembahasan dan Hasil Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai anggaran belanja langsung berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah dimana terdapat beberapa azas yang perlu diperhatikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang untuk mencapai target yang diinginkan.

1. Analisis Secara Tertib

Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil wawancara kepada Bendahara Bagian Pengeluaran dan Kasubbag Bagian Keuangan berdasarkan realisasi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah tepat waktu sesuai dengan Per 31 Desember setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dimana setiap tahunnya tidak terealisasi 100% atau mencapai target yang diinginkan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
Tahun 2012-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2012	4.939.588.740	4.587.265.462	92,86
2013	5.796.937.000	5.163.138.634	89,06
2014	4.750.327.000	4.416.030.348	92,96
2015	8.507.061.600	8.134.085.301	95,61

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, 2016

Data tabel IV.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan anggaran yang diberikan pemerintah yaitu 92,86%, ditahun 2013 realisasi anggaran menurun dari tahun sebelumnya sebesar 89,06%, selanjutnya pada tahun 2014 realisasi anggaran meningkat lagi sebesar 92,96%, dan di tahun terakhir 2015 realisasi anggaran menjadi 95,61% dari data tabel IV.1 juga menunjukan bahwa anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah dikelola secara tertib.

2. Analisis Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Bagian Pengeluaran dan Kasubbag Bagian Keuangan dan analisis dokumentasi dari realisasi dan anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah dibuat berdasarkan tahapan-tahapan proses penyelenggaraan penatausahaan keuangan dasar, kebijakan serta rincian pos-pos laporan keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan menurut analisis penulis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah melakukan pengelolaan keuangannya sesuai pada peraturan perundangan-undangan yang ada.

3. Analisis Efektif

Efektif sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu operasional telah mencapai tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut ini formula atau rumus rasio untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang:

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel IV.2
Kriteria Kinerja Anggaran

Persentase	Keterangan
≥100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
≥60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327,1996

Melalui rumus di atas dapat dilakukan analisis tingkat efektifitas anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang setiap tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun 2012

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 4.587.265.462, sedangkan anggarannya sebesar Rp. 4.939.588.740.

Maka rasio tingkat efektifitas anggaran belanja langsung untuk tahun 2012 adalah:

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{4.587.265.462}{4.939.588.740} \times 100\%$$

$$= 92{,}86\%$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat pencapaian efektifitas anggaran belanja langsung adalah sebesar 92,86%. Berdasarkan Kriteria keputusan menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efektifitas anggaran, maka kinerja pada tahun 2012 efektif.

b. Tahun 2013

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 5.163.138.634, sedangkan anggarannya sebesar Rp. 5.796.937.000.

Maka rasio tingkat efektifitas anggaran belanja langsung untuk tahun 2013 adalah:

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{5.163.138.634}{5.796.937.000} \times 100\%$$

$$= 89{,}06\%$$

Artinya pada tahun 2013 tingkat efektifitas anggaran belanja langsung adalah sebesar 89,06%. Berdasarkan Kriteria keputusan menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efektifitas anggaran, maka kinerja pada tahun 2013 cukup efektif.

b. Tahun 2014

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 4.416.030.348, sedangkan anggarannya sebesar Rp. 4.750.327.000

Maka rasio tingkat efektifitas anggaran belanja langsung untuk tahun 2014 adalah:

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{4.416.030.348}{4.750.327.000} \times 100\%$$

$$= 92{,}96\%$$

Artinya pada tahun 2014 tingkat efektifitas anggaran belanja langsung adalah sebesar 92,96%. Berdasarkan Kriteria keputusan menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efektifitas anggaran, maka kinerja pada tahun 2014 efektif.

c. Tahun 2015

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 8.134.085.301, sedangkan anggarannya sebesar Rp. 8.507.061.600

Maka rasio tingkat efektifitas anggaran belanja langsung untuk tahun 2015 adalah:

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{8.134.085.301}{8.507.061.600} \times 100\%$$

$$= 95{,}61\%$$

Artinya pada tahun 2015 tingkat efektifitas anggaran belanja langsung adalah sebesar 95,61%. Berdasarkan Kriteria keputusan menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efektifitas anggaran, maka kinerja pada tahun 2015 efektif.

Berikut ini tabel rasio tingkat efektifitas anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang:

Tabel IV.3
Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
Tahun 2012-2015

Tahun	Target Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2012	4.939.588.740	4.587.265.462	92,86	Efektif
2013	5.796.937.000	5.163.138.634	89,06	Cukup Efektif
2014	4.750.327.000	4.416.030.348	92,96	Efektif
2015	8.507.061.600	8.134.085.301	95,61	Efektif

Sumber: Data diolah, 2016

4. Analisis Efisien

Efisien sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Suatu operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (*spending well*). Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palembang dalam penghematan dana yang ada dalam menjalankan program yang telah ditetapkan dengan membandingkan anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung setiap tahunya.

Berikut ini formula atau rumus rasio untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel IV.4
Kriteria Kinerja Anggaran

Persentase	Keterangan
≥100%	Tidak efisien
90-100%	Kurang efisien
80-90%	Cukup efisien
60-80%	Efisien
≥60%	Sangat efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327,1996

Melalui rumus di atas dapat dilakukan analisis tingkat efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang setiap tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun 2012

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 6.922.544.945, sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.939.588.740.

Maka rasio tingkat efisiensi anggaran belanja langsung untuk tahun 2012 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{4.939.588.740}{6.922.544.945} \times 100\%$$

$$= 71{,}35\%$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat pencapaian efisiensi anggaran belanja langsung adalah sebesar 71,35%. Berdasarkan Kriteria keputusan menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efisiensi anggaran, maka kinerja pada tahun 2012 efisien.

b. Tahun 2013

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 8.614.460.783, sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.796.937.000.

Maka rasio tingkat efisiensi anggaran belanja langsung untuk tahun 2013 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{5.796.937.000}{8.614.460.783} \times 100\%$$

$$= 67{,}29\%$$

Artinya pada tahun 2013 tingkat efisiensi anggaran belanja langsung adalah sebesar 67,29%. Berdasarkan Kriteria keputusan menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efisiensi anggaran, maka kinerja pada tahun 2013 efisien.

c. Tahun 2014

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 8.451.947.294, sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.750.327.000

Maka rasio tingkat efisiensi anggaran belanja langsung untuk tahun 2014 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{4.750.327.000}{8.451.947.294} \times 100\%$$

$$= 56{,}20\%$$

Artinya pada tahun 2014 tingkat efisiensi anggaran belanja langsung adalah sebesar 56,20%. Berdasarkan Kriteria keputusan

menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efisiensi anggaran, maka kinerja pada tahun 2014 sangat efisien.

d. Tahun 2015

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 12.219.039.953, sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.507.061.600

Maka rasio tingkat efisiensi anggaran belanja langsung untuk tahun 2015 adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{8.507.061.600}{12.219.039.953} \times 100\%$$

$$= 69{,}62\%$$

Artinya pada tahun 2015 tingkat efisiensi anggaran belanja langsung adalah sebesar 69,62%. Berdasarkan kriteria keputusan menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria efisiensi anggaran, maka kinerja pada tahun 2015 efisien.

Berikut ini tabel rasio tingkat efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang:

Tabel IV.5
Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
Tahun 2012-2015

Tahun	Target Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
2012	4.939.588.740	6.922.544.945	71,35	Efisien
2013	5.796.937.000	8.614.460.783	67,29	Efisien
2014	4.750.327.000	8.451.947.294	56,20	Sangat Efisien
2015	8.507.061.600	12.219.039.953	69,62	Efisien

Sumber: Data diolah, 2016

5. Analisis Transparan

Transparan sebagaimana dimaksud merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Bagian Pengeluaran dan Kasubbag Bagian Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah transparan dalam menerapkan azas umum pengelolaan keuangan daerah.

6. Analisis Bertanggungjawab

Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Bagian Pengeluaran dan Kasubbag Bagian Keuangan untuk analisis bertanggungjawab disini adalah wujud dari kewajiban dari pengguna anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang belum bisa bertanggungjawab dengan baik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dikarenakan masih lemahnya dalam perencanaan anggaran untuk mencapai tujuan yang ada pada dinas itu sendiri.

7. Analisis Keadilan

Keadilan sebagaimana dimaksud adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Bagian Pengeluaran dan Kasubbag Bagian Keuangan analisis keadilan dapat dilihat pada pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat dan harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskrimansi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah melakukan keadilan dengan baik terhadap keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

8. Analisis Kepatutan

Kepatutan sebagaimana dimaksud adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Bagian Pengeluaran dan Kasubbag Bagian Keuangan dalam hal ini bila suatu Dinas telah ditetapkan pagu APBD untuk anggaran belanja oleh Pemerintah Daerah, Walikota yang dikelola melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah), maka Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut harus bisa mengelola APBD anggaran tersebut agar terlihat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD itu berhasil atau tidaknya suatu tujuan dan sasaran strategis dari SKPD tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah dengan baik menjalankan analisis kepatutan berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah.

9. Analisis Manfaat untuk Masyarakat

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Bagian Pengeluaran dan Kasubbag Bagian Keuangan bahwa dari suatu anggaran belanja akan dihasilkan suatu Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang setiap akhir tahun yang

berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kepentingan dari SKPD tersebut. Dari analisis dokumentasi program dan kegiatan di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah memberikan manfaat dengan baik kepada masyarakat dalam menerapkan azas umum pengelolaan keuangan daerah.

Berikut ini program dan kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang:

Tabel IV.6
Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1.	Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
2.	Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
3.	Program kerja sama dengan mass media penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
4.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
		Penyediaan jasa administrasi

		keuangan
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan makanan dan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
		Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
5.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas atau operasional
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		Pembangunan gedung kantor
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
		Pengadaan pakaian kerja lapangan
7.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Penyusunan laporan keuangan semesteran
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
		Penyusunan pelaporan keuangan

		akhir tahun
		Pemuktahiran dan rekonsiliasi data APBD
		Penyusunan laporan triwulan
		Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas
		Penyusunan RKA/RAKP SKPD

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, 2016

Dari analisis dokumentasi media massa bahwa pada program kerja sama dengan mass media penyebarluasan informasi pembangunan daerah pada kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang internet sehat dan aman (INSAN) kepada para kalangan pelajar yang pertama di SMK Negeri 4 Kota Palembang, yang kedua di SMA Patra Mandiri 1 Plaju, dan yang terakhir di MAN 1 Jakabaring. Kegiatan ini merupakan Program Pemerintah Kota Palembang dalam upaya memberikan kenyamanan dan pembinaan kepada siswa atau pelajar agar dapat memanfaatkan teknologi informasi internet dengan baik dan benar sehingga memberikan manfaat yang baik untuk kemajuan pendidikan anak-anak di sekolah. *(sumber: bulletinmetropolis.com)*

Kegiatan program di atas dapat dilihat melalui website palembangterkini.wordpress.com dan kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari program dan kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah untuk belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2012-2015 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transaparan, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman azas umum pengelolaan keuangan daerah. Hanya saja belum dikelola secara bertanggungjawab disebabkan alokasi anggaran belanja langsung tidak terealisasi 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka pada bagian ini penulis memberikan saran yang mungkin bisa menjadi bahan masukan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yaitu agar dapat mengoptimalkan kinerja anggaran belanja sehingga anggaran belanja langsung dapat terealiasi 100% dan tujuan pencapaian realisasi, kemajuan, pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang di masa yang akan datang dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Anastasia Patricia. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung Pada SKPD Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, (online), Vol. 1 No. 3, (http://academia.education/8755341/Analisis, diakses 20 Mei 2016).

Erlina, Omar dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.* Jakarta: Salemba Empat.

Husein Umar. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Edisi kedua.Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mongkau. 2011. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, (online), Vol. 2 No.3, (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/5735/5267, diakses 20 Mei 2016).

Nur Indriantoro dan Bambang Soepomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen.* Yogyakarta: BPSE Yogyakarta.

Program Strata Satu. 2014. *Pedoman Penulisan Usulan Peneltian dan Skripsi.* Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang *Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.*

Retno Sundari. 2013. Analisis Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. *Jurnal Belanja Langsung,* (online), (http://repository.usu.ac.id/bitstream/189771, diakses 22 Juni 2016).

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: CV Alfabeta.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Nyoman Ratu No. 1271 Telp. (0711) 352271 Fax. (0711) 353262 PALEMBANG 30129
website : http://inforkom.palembang.go.id e-mail : dinas@inforkom.palembang.go.id

Palembang, 2016

No : 900/ /V/K/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas
MuhammadiyahPalembang
di-
Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 364/H-5/FeEB-UMP/IV/2016, Tanggal 5 April 2016 Hal, Mohon bantuan data.

Berkenan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin Kepada :

Nama : Dila Apriani
NIM : 222012139
Jurusan : Akuntansi

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul " Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang" .Data/ Informasi yang diperoleh tidak untukdipublikasikan , selanjutnya memberikan laporan hasil penelitian Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang

Decki Lenggardi, S.E, M.Si
NIP. 196406041993031008

BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN VERSI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SKPD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

(Dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	1.359.517.953,00	(559.517.953,00)
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-
		-	-	-
	Jumlah	800.000.000,00	1.359.517.953,00	(559.517.953,00)
2	BELANJA			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2.1.1	Belanja Pegawai	2.721.905.000,00	2.335.279.483,00	386.625.517,00
		2.721.905.000,00	2.335.279.483,00	386.625.517,00
2.2	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1	Belanja Pegawai	4.939.588.740,00	4.587.265.462,00	352.323.278,00
2.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.012.246.395,00	978.021.000,00	34.225.395,00
2.2.3	Belanja Modal	2.557.599.075,00	2.274.251.462,00	283.347.613,00
		1.369.743.270,00	1.334.993.000,00	34.750.270,00
	Jumlah	7.661.493.740,00	6.922.544.945,00	738.948.795,00
3.3				
	Surplus/(Defisit)	(6.861.493.740,00)	(5.563.026.992,00)	(1.298.466.748,00)

Palembang, 28 Januari 2013
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang
Selaku Pengguna Anggaran

Faisyar,SE,MSp
Pembina Utama Muda
Nip. 195904161988021001

BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN VERSI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SKPD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013

(Dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,750,000,000.00	1,811,718,734.00	(61,718,734.00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-
	Jumlah	1,750,000,000.00	1,811,718,734.00	(61,718,734.00)
2	BELANJA			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,909,497,000.00	3,451,322,149.00	458,174,851.00
2.1.1	Belanja Pegawai	3,909,497,000.00	3,451,322,149.00	458,174,851.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	5,796,937,000.00	5,163,138,634.00	633,798,366.00
2.2.1	Belanja Pegawai	898,205,000.00	777,245,000.00	120,960,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,137,612,000.00	3,786,921,634.00	350,710,366.00
2.2.3	Belanja Modal	761,100,000.00	598,972,000.00	162,128,000.00
	Jumlah	9,706,434,000.00	8,614,460,783.00	1,091,973,217.00
3.3	Surplus/(Defisit)	(7,956,434,000.00)	(6,802,742,049.00)	(1,153,691,951.00)

Palembang, Januari 2014
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang
Selaku Pengguna Anggaran

Decki Lenggardi,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196406041993031008

BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN VERSI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SKPD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2,000,000,000.00	2,393,331,992.00	(393,331,992.00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-
	Jumlah	2,000,000,000.00	2,393,331,992.00	(393,331,992.00)
2	BELANJA			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,336,554,000.00	4,035,916,946.00	300,637,054.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,336,554,000.00	4,035,916,946.00	300,637,054.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	4,750,327,000.00	4,416,030,348.00	334,296,652.00
2.2.1	Belanja Pegawai	421,005,000.00	409,711,000.00	11,264,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan jasa	3,736,772,000.00	3,421,795,348.00	314,976,652.00
2.2.3	Belanja Modal	592,550,000.00	584,494,000.00	8,056,000.00
	Jumlah	9,086,881,000.00	8,451,947,294.00	634,933,706.00
3.3	Surplus/(Defisit)	(7,086,881,000.00)	(6,058,615,302.00)	(1,028,265,698.00)

Palembang, Pebruari 2015
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang
Selaku Pengguna Anggaran

Decki Lenggardi,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip 196405041993031008

BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN VERSI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SKPD KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015

(Dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	-	-	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2,200,000,000.00	2,212,882,474.00	(12,882,474.00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-
	Jumlah	2,200,000,000.00	2,212,882,474.00	(12,882,474.00)
2	BELANJA			
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,518,478,000.00	4,084,954,652.00	433,523,348.00
2.1.1	Belanja Pegawai	4,518,478,000.00	4,084,954,652.00	433,523,348.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	8,507,061,600.00	8,134,085,301.00	372,976,299.00
2.2.1	Belanja Pegawai	302,394,000.00	263,654,000.00	38,740,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan jasa	3,046,147,600.00	2,712,631,301.00	333,516,299.00
2.2.3	Belanja Modal	5,158,520,000.00	5,157,800,000.00	720,000.00
	Jumlah	13,025,539,600.00	12,219,039,953.00	806,499,647.00
3.3	Surplus/(Defisit)	(10,825,539,600.00)	(10,006,157,479.00)	(819,382,121.00)

Palembang, Pebruari 2016
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang
Selaku Pengguna Anggaran

Decki Lenggardi,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196406041993031008

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **Dila Apriani**	PEMBIMBING	
NIM	: **222012139**	KETUA	:**Muhammad Fahmi, SE., M.Si**
PROGRAM STUDI	: **Akuntansi**	ANGGOTA	:

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG**

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	5 Juli 2016	Bab 1, 2, 3.			Lengkapi
2					& perbaiki!
3	20 Juli 2016	perbaiki			perbaiki!
4					
5	1 Agustus 2016	Bab & analisis			perbaiki!
6					
7	3 Agustus 2016	Bab & analisis			perbaiki!
8					
9	5 Agustus 2016	Analisis & lengkapi			perbaiki!
10					
11	6 Agustus 2016	All & Abstrak			Acc Sidang.
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA

BIODATA PENULIS

Nama	: Dila Apriani
NIM	: 22 2012 139
Tempat dan Tanggal Lahir	: Palembang, 15 April 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1260 Rt. 22 Rw. 08 Kel. Sei Pangeran Kec. Ilir Timur 1, Palembang
No. Hp	: 08980834434
Hobi	: Travelling

Palembang, Agustus 2016
Penulis

Dila Apriani

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Email : febumplg@umpalembang.ac.id
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	: Senin, 29 Agustus 2016
Waktu	: 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama	: Dila Apriani
Nim	: 222012139
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: ANALISIS BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Pembimbing	22/9/2016	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	19/9/2016	
3	Mizan, S.E, M.Si, Ak. CA	Penguji I	16/9/2016	
4	Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Penguji II	16/9/2016	

Palembang, September 2016
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E. M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806